

STRATEGI NASIONAL KEBIJAKAN KEUANGAN INKLUSIF

Agenda Pembahasan

1. Pendahuluan

- Latar Belakang, Tujuan dan Pengertian Keuangan Inklusif

2. Program Keuangan Inklusif di Indonesia

- Lingkup dan beberapa isu pokok dalam keuangan inklusif
- Sasaran Keuangan Inklusif
- Isu pokok Keuangan Inklusif
- Lima pilar Keuangan Inklusif
- Peran BI dalam pengembangan UMKM pra UU 23/1999
- Beberapa yang masih ada di BI
- Beberapa program terkait di instansi lain
- Beberapa target jangka pendek (*quick wins*)

3. Organisasi Program keuangan Inklusif dalam skala nasional

- Peran BI dalam program nasional tersebut
- Bagan Organisasi dalam skala nasional

Latar Belakang

1. Kebijakan keuangan inklusif (*Financial Inclusion*) memegang peran penting dalam mendukung kebijakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan pendekatan *pro growth, pro poor, pro job dan pro environment*.
2. Pidato Presiden RI - Susilo Bambang Yudhoyono pada Global Policy Forum, September 2010 tentang *financial inclusion*:

“Through financial access we can provide affordable financial services for people living with a low-income. This in turn will unlock many financial opportunities to improve their well-being, and close the economic and social gap. This will ultimately reduce poverty and inequality.”

3. Kebijakan keuangan inklusif telah menjadi salah satu agenda penting dalam dunia Internasional, demi meningkatkan kelibatan seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan, khususnya di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Keuangan Inklusif sebagai Bagian dari Upaya Pengentasan Kemiskinan

- Dalam upaya pemberantasan kemiskinan diperlukan tiga strategi inklusif yakni: **Sosial Inklusif** (pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, tata kelola pemerintahan yang baik, isu gender); **Ekonomi Inklusif** (peluang kerja, isu tenaga kerja, iklim investasi dan perdagangan, UMKM, dan pengembangan bisnis) dan **Keuangan Inklusif**.

Terkait dengan strategi ketiga ini, laporan World Bank (2009) menunjukkan bahwa 50% penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan jasa keuangan.

- Untuk dapat menjangkau masyarakat yang belum memperoleh akses terhadap layanan keuangan ini, diperlukan terobosan yang inovatif dimana pemerintah dan masyarakat/swasta dapat bekerja sama.
- Beberapa contoh langkah mengatasi akses terhadap jasa keuangan ini yang berhasil di negara lain antara lain dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi, meningkatkan jalur distribusi dan dukungan ketentuan/kebijakan. Edukasi keuangan juga merupakan aspek penting dalam strategi keuangan inklusif.
- Strategi nasional yang terintegrasi dengan upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan taraf ekonomi lainnya harus diletakkan menjadi sebuah strategi jangka panjang yang dapat menjadi panduan bagi pengambil kebijakan dan pelaku pasar.

Tujuan Program Keuangan Inklusif

Secara umum bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat "*economically active poor*" kepada layanan jasa keuangan sehingga akan :

- Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- Membantu mengurangi kemiskinan
- Membantu mengurangi pengangguran
- Meningkatkan perekonomian di daerah terpencil
- Meningkatkan *literacy* dan tingkat pendidikan bangsa
- Membantu mengelola keuangan
- Meningkatkan layanan pembayaran (*payment service*) dan jasa keuangan terutama di daerah terpencil khususnya perbatasan
- Meningkatkan cakupan pasar lembaga keuangan
- Diversifikasi produk bagi lembaga keuangan

Pengertian Keuangan Inklusif

“Suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan baik yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam menggunakan dan/atau memanfaatkan layanan jasa keuangan.” (disarikan dari berbagai definisi yang antara lain dikemukakan oleh: World Bank, 2008; European Commisison 2008; McKillop and Wilson, 2007; Leyshon & Thrift, 1993; Sinclair, 2001).

Ruang lingkup keuangan inklusif di Indonesia

- World Bank, 1995 menyebutkan empat jenis layanan jasa keuangan yang dianggap vital bagi kehidupan masyarakat yakni layanan penyimpanan dana, kredit, sistem pembayaran dan asuransi.
- Untuk Indonesia, selain keempat layanan ini, juga akan mencakup layanan jasa keuangan yang akan dikembangkan dikemudian hari.

Penyedia layanan keuangan

- Sesuai kondisi riil di Indonesia dan merujuk pada pidato Presiden RI, layanan jasa keuangan tersebut tidak hanya mencakup layanan perbankan, namun juga layanan lembaga keuangan non bank termasuk lembaga keuangan mikro.
- Namun untuk menjamin tersedianya akses terhadap keempat produk tersebut, perlu penguatan jalinan antara lembaga keuangan non bank formal tersebut dengan perbankan.

Sasaran Umum Keuangan Inklusif (1)

Di antara beberapa kategori masyarakat miskin, sasaran umum bagi target grup keuangan Inklusif adalah *economically active poor* (masyarakat miskin yang produktif).

Pengelompokkan kategori miskin :

- **The Poorest of The Poor**

Penduduk miskin yang tidak memiliki sumber pendapatan karena berbagai faktor seperti sakit, cacat fisik sehingga tidak memiliki pendapatan

- **Labouring Poor**

Kelompok miskin yang bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sangat terbatas dan bersifat tidak tetap atau musiman yang pada umumnya bekerja di sektor pertanian atau sektor-sektor lainnya yang bersifat padat karya.

- **Self Employed Poor**

Kelompok penduduk miskin yang berpenghasilan relatif cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar dengan bekerja di sektor informal.

- **Economically active poor**

Kelompok penduduk miskin yang memiliki kekuatan atau kemampuan ekonomi dengan sumber pendapatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar dan memiliki surplus income.

Sasaran Umum Keuangan Inklusif (2)

Jika dikaitkan dengan antara kelompok usaha dengan program pembiayaan yang ada di Indonesia, dapat dikelompokkan menjadi:

- Kelompok penduduk miskin, terdapat 2 kelompok :
 - a. Kelompok Fakir miskin
 - b. Kelompok Miskin
- Dalam rangka pemberdayaan kedua kelompok ini, maka program pembiayaan Pemerintah antara lain: program perlindungan sosial (PNPM klaster 1), program pemberdayaan sosial, dan program pemberdayaan fakir miskin.
- Kelompok Usaha Mikro yang belum *feasible* dan belum bankable; program yang tersedia diantaranya : program pemberdayaan usaha mikro dan program pemberdayaan masyarakat.
- Kelompok Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang sudah *feasible* akan tetapi belum bankable; program pembiayaan yang disediakan antara lain: program pembiayaan dari LKM dan perbankan, program pemberdayaan usaha mikro dan kecil, program pemberdayaan masyarakat dan program dana bergulir dari kemenkop UKM dan Kemen BUMN.

Beberapa isu pokok dalam keuangan inklusif

Simpanan

- Pendapatan terbatas dan musiman.
- Tingginya biaya administrasi
- Terbatasnya pengetahuan akan manfaat menabung
- Jarak ke kantor bank cukup jauh
- Kemungkinan sulitnya memenuhi persyaratan pembukaan rekening

Pinjaman

- Rendahnya nilai ekonomis usaha dari productive poor.
- Aspek legal (pengikatan jaminan, bentuk usaha perorangan)
- Lemahnya kemampuan pengelolaan usaha
- Lokasi jauh dari kantor bank
- Terbatasnya skim kredit bank untuk kebutuhan masyarakat miskin
- Kurangnya insentif bagi bank untuk memberi kredit productive poor
- Local knowledge bank tak memadai untuk menjangkau masyarakat ini.

Keikutsertaan dalam sistem pembayaran

- Rendahnya pengetahuan akan manfaat sistem pembayaran
- Jarak ke kantor bank yang cukup jauh
- Kemungkinan sulitnya memenuhi persyaratan pembukaan rekening
- Kendala tidak langsung karena berbagai policy BI/pemerintah

Asuransi

- Rendahnya pengetahuan akan manfaat asuransi
- Persepsi bahwa asuransi adalah produk mewah.
- Rendahnya daya jangkau asuransi kepada masyarakat

Lima pilar kegiatan untuk menghilangkan hambatan terhadap akses keuangan

- Edukasi: meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan, termasuk mengenai lembaga mediasi, YLKI dsb.
- Eligibilitas: meningkatkan eligibilitas masyarakat antara lain dengan FIN, lembaga rating, *capacity building*, dsb.
- Fasilitasi intermediasi: Meningkatkan *awareness* perbankan terhadap masyarakat miskin yang produktif.
- Policy dan ketentuan: Membuat ketentuan yang mendukung dan menghilangkan ketentuan yang menghambat.
- Distribusi: Meningkatkan daya jangkau lembaga keuangan khususnya bank, sehingga memudahkan akses/channel dari masyarakat miskin produktif kepada lembaga tersebut. Hal ini dilakukan melalui instrumen agent banking, phone banking dan mobile banking.

Lima Pilar Keuangan Inklusif

Keterangan:

●	:	Program sudah dilakukan BI
●	:	Program akan dilakukan BI
●	:	Program relevan dengan lembaga/instansi lain di luar BI
○	:	Pilar tidak relevan dengan kegiatan

Akses Keuangan Masyarakat Miskin Produktif terhadap LK Bank dan Non Bank

Pilar	Tabungan	Kredit	Sistem Pembayaran	Asuransi	Jasa Keuangan lainnya untuk UMKM*
<u>Edukasi Keuangan</u>	●	●	●	●	●
<u>Eligibilitas Keuangan</u>	●	●	●	●	●
<u>Kebijakan/ Peraturan yang Mendukung</u>	●	●	●	●	●
<u>Fasilitasi Intermediasi</u>	○	●	○	●	
<u>Distribusi</u>	●	●	●	●	
: <u>Agent Banking</u>	●	○	●	○	
: <u>Phone Banking</u>	○	○	●	○	
: <u>Mobile Banking</u>	●	●	●	●	

www.ahmadsubagyo.com

*) Contohnya : commercial paper, reksadana, dll

Infrastruktur

Peran BI dalam Pengembangan UMKM sebelum UU No. 23/1999

(1)

- Upaya BI dalam pengembangan UMKM telah dimulai sejak awal 1960-an melalui pemberian KLBI untuk pemberian kredit program, diawali skim Kredit Bimas/Inmas dan diikuti dengan hampir 20 skim kredit program, yang diutamakan kepada petani, koperasi dan pengusaha mikro dan kecil
- Skim kredit program tersebut diterbitkan sejalan dengan program-program Pemerintah, diantaranya Kredit kepada Koperasi untuk Anggotanya (KKPA) untuk nelayan, intensifikasi tebu rakyat, transmigrasi, peternak, TKI, dsb.

Peran BI dalam Pengembangan UMKM sebelum UU No. 23/1999

(2)

- Proyek pengembangan Usaha Kecil (PPUK), yakni penempatan tenaga konsultan di KBI untuk memberikan pelatihan
- Proyek Pengembangan Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya masyarakat (PHBK), yaitu untuk meningkatkan pelayanan keuangan yang layak bagi kelompok simpan pinjam/kelompok swadaya masyarakat
- Proyek Kredit Mikro (PKM), yakni pemberian bantuan teknis dan bantuan keuangan kepada nasabah mikro dan lembaga keuangan mikro

Koordinasi nasional program keuangan inklusi

- Pidato Presiden menyebut terdapat 6 kondisi untuk suksesnya program keuangan inklusif ini. Dua diantaranya adalah adanya *Leadership* dan Koordinasi.
- Arahan tersebut mengingatkan luasnya cakupan dan kewenangan yang menyangkut lintas sektoral antar instansi pemerintah.
- Untuk itu dipandang perlu menjadikan program keuangan inklusif ini, sebagai sebuah program nasional dalam koordinasi kantor Presiden atau Wakil Presiden.

Peran Bank Indonesia dalam koordinasi nasional keuangan inklusif

1. Demi efektivitas pelaksanaan keuangan inklusif tersebut, BI dapat berperan optimal menjalankan fungsi kesekretariatan.
2. Hal tersebut dilandasi pertimbangan sbb :
 - Keuangan inklusif mencakup berbagai kegiatan yang terkait dengan lembaga keuangan (antara lain, simpanan, kredit dan transfer/sistem pembayaran). Di Indonesia 80% aktivitas lembaga keuangan dilakukan melalui perbankan;
 - Pengalaman dan peran BI dalam pengembangan UMKM yang telah dimulai sejak 1960 an sampai dengan saat ini masih terus dilakukan melalui berbagai instrumen kebijakan sesuai koridor UU;
 - Peran BI dalam fora-fora internasional yang terkait dengan stabilitas sistem keuangan dapat mendorong peran Indonesia dalam fora-fora tersebut. Saat ini, BI telah dipilih menjadi ketua *working group* keuangan inklusif di *Global Partnership Financial Inclusion (GPII)*-G20 dan OECD.
 - Bank Indonesia memiliki sumber daya yang kompeten dalam melaksanakan program ini.
 - Pada banyak negara program ini berada dibawah koordinasi bank sentral

Peran Bank Sentral di Negara Lain

- Mexico : Development National Plan 2007-2012 yang mencakup berbagai kegiatan untuk meningkatkan kegiatan keuangan inklusif bekerja sama erat dengan bank sentral dan otoritas lembaga keuangan
- Pakistan : State Bank of Pakistan pada tahun 2007 menerbitkan program perbaikan keuangan inklusif
- Brasil : Bank Sentral memelopori berbagai kegiatan untuk keuangan inklusif
- Malaysia : Bank Negara Malaysia membentuk unit khusus untuk pengembangan keuangan inklusif
- Philipina : Banko ng Philipine komitmen untuk pengembangan keuangan inklusif, khususnya dalam hal *mobile banking*

LAMPIRAN

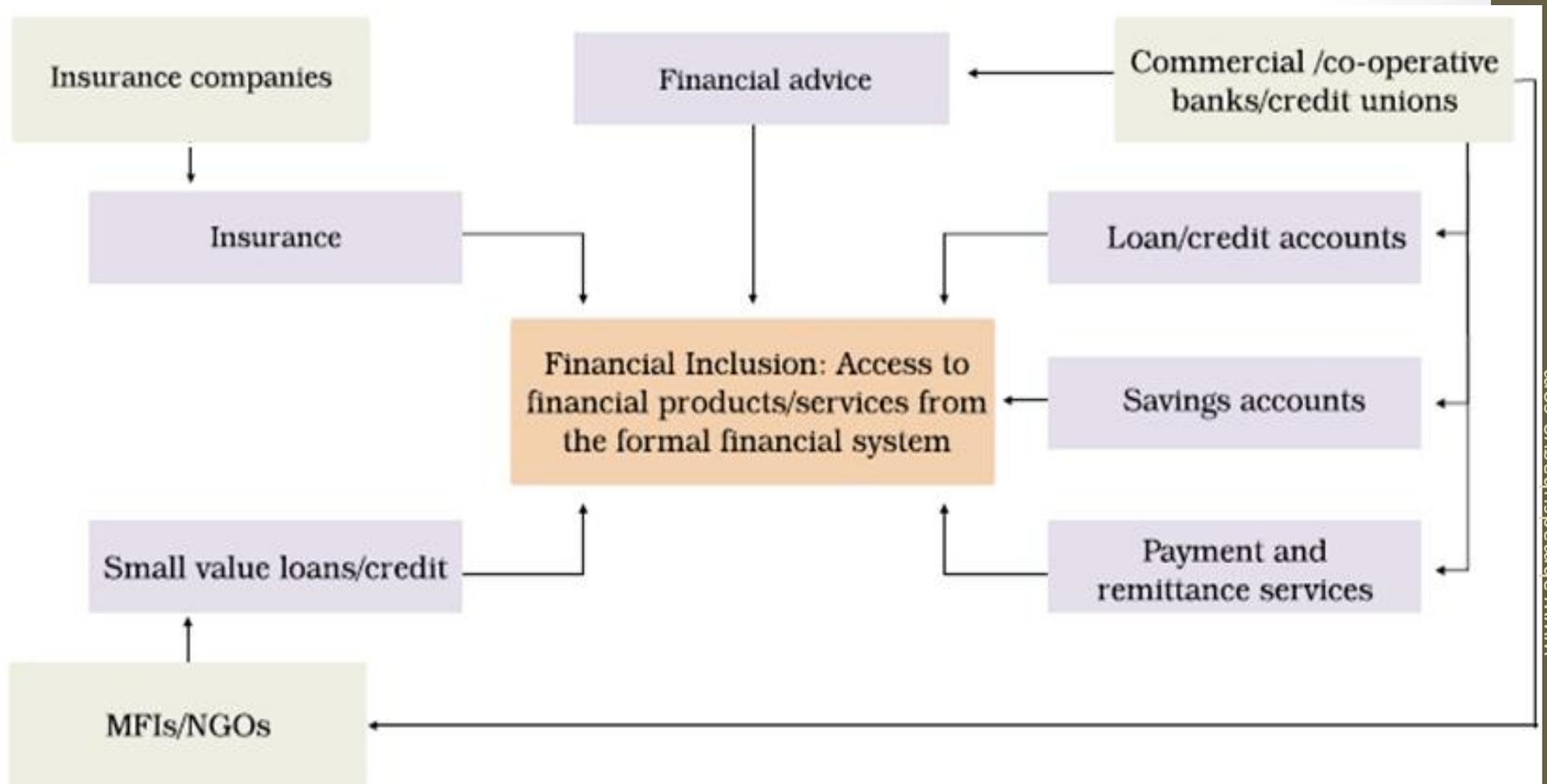
Agenda Internasional terhadap Keuangan Inklusif

- A. Hasil Pertemuan G20 di Toronto pada bulan Juli 2010 menghasilkan 9 prinsip dasar Financial Inclusion: Leadership, Diversity, Innovation, Protection, Empowerment, Cooperation, Knowledge, Proportionality and Framework.
- B. Pertemuan G20 di Korea pada bulan September 2010 menyepakati dibentuknya International Forum Financial Inclusion Working group
- C. Pertemuan OECD di Beirut pada bulan Oktober 2010 membentuk Financial Inclusion Working Group
- D. Pertemuan APEC di Kyoto pada awal November 2010 juga menyetujui terbentuknya kegiatan Financial Inclusion Working Group
- E. Leaders Summit G 20 di Korea pada minggu kedua November 2010 menyepakati terbentuknya Financial Inclusion Working Group

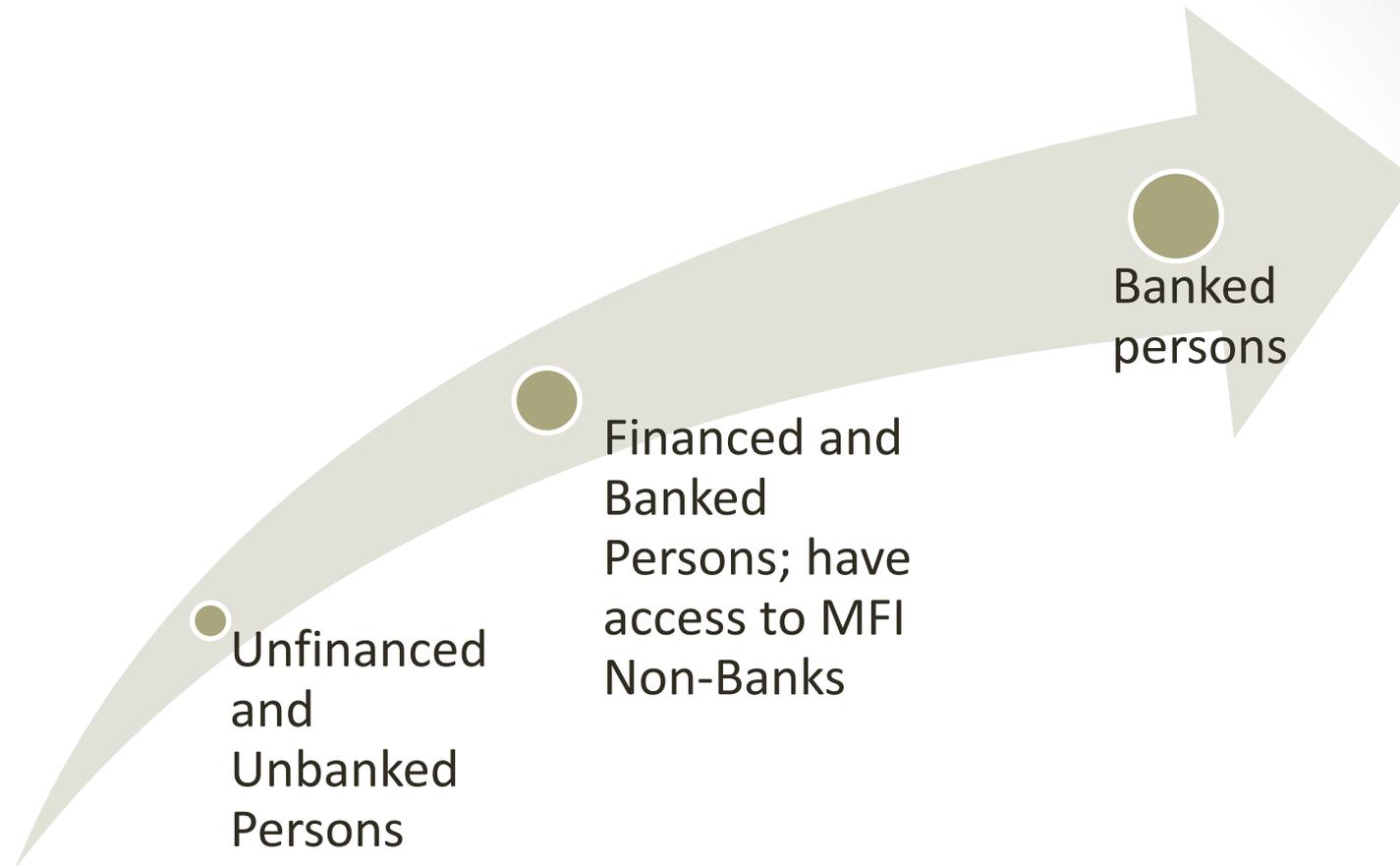
Hubungan SSK dan Keuangan Inklusif



Bagan Kebijakan Keuangan Inklusif

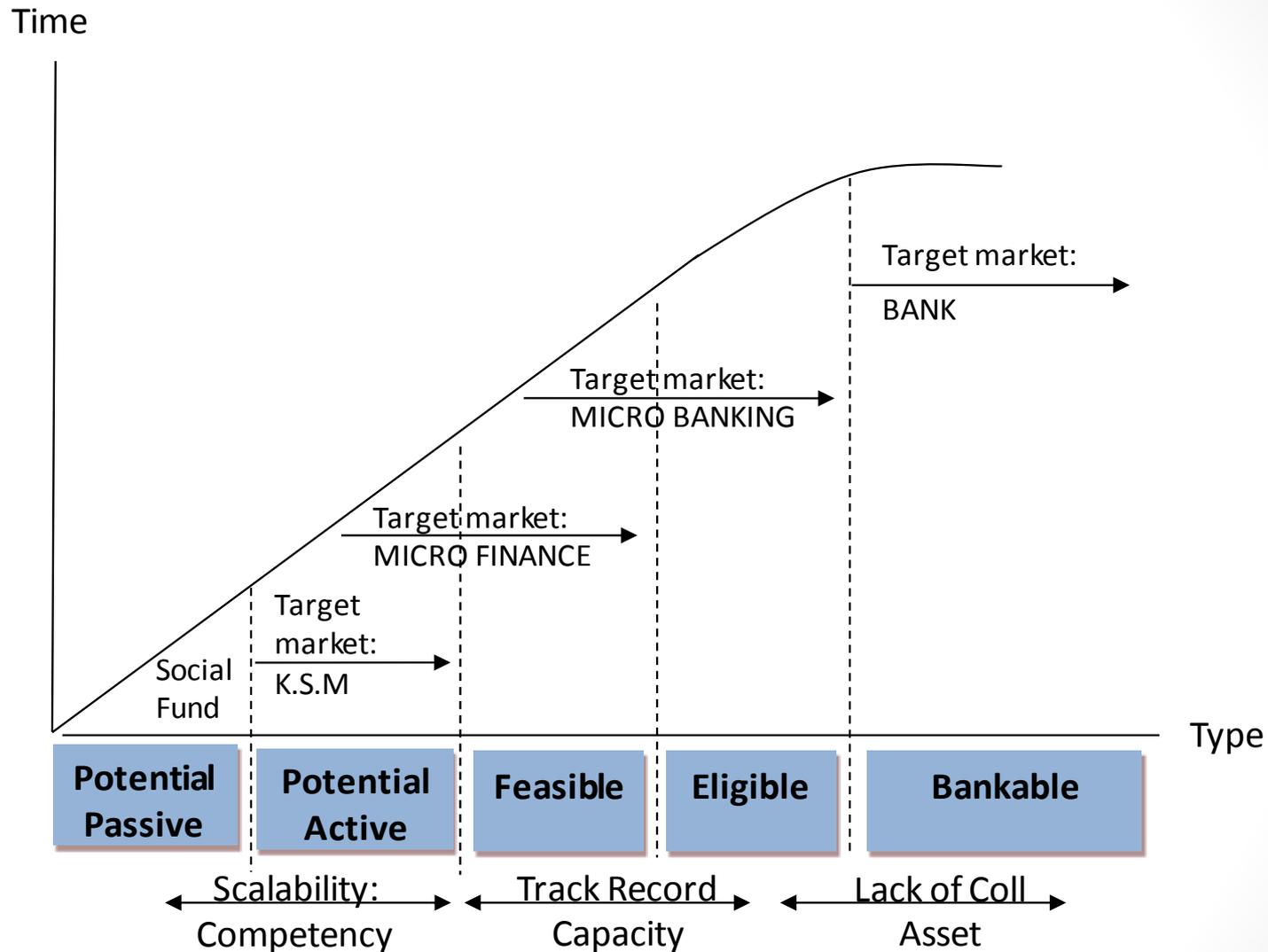


Proses Implementasi Keuangan Inklusif



- Keuangan Inklusif tetap memberi ruang yang luas kepada MFI non-bank untuk berperan aktif
- Integrasi MFI Non-Bank dalam Sistem Perbankan tanpa mematikan MFI Non-Bank dan BPR

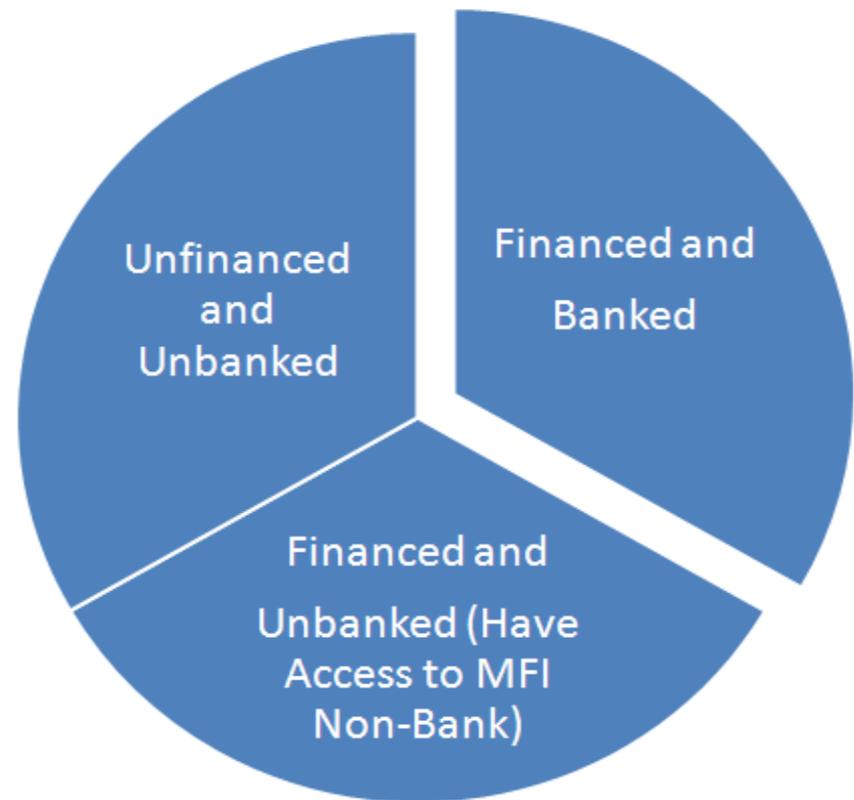
Proses Unbanked menjadi Banked



*) source : Nining I. Soesilo, Microfinance Portrait and Development in Indonesia, 2008

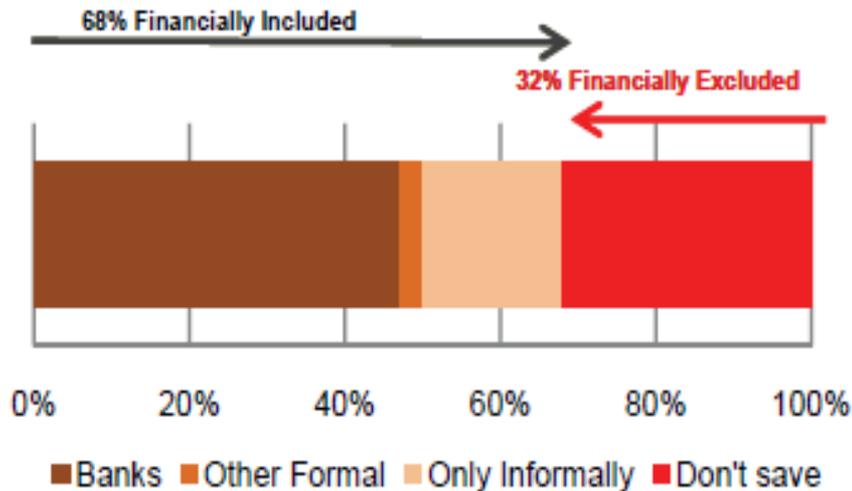
Unbanked Person

- Orang-orang yang tinggal dipedalaman (rural and urban) seperti petani, peladang, nelayan.
- Buruh industri dan pertanian
- Orang-orang yang bekerja di sektor non formal
- Pengangguran
- Wanita
- Anak-anak
- Pelajar
- Lansia
- Orang-orang cacat

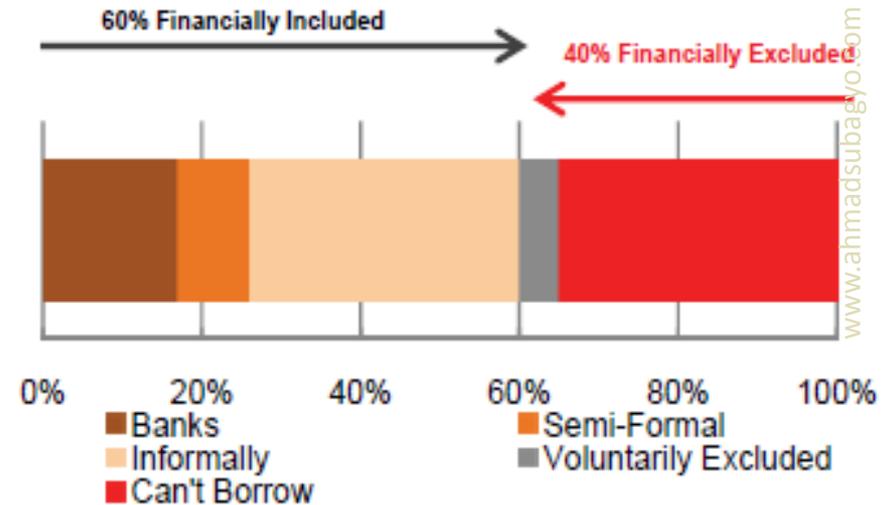


Tingkat Keuangan Inklusif di Indonesia

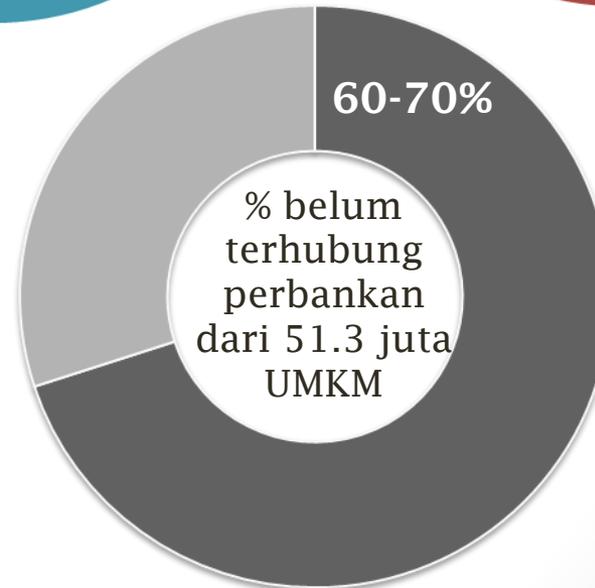
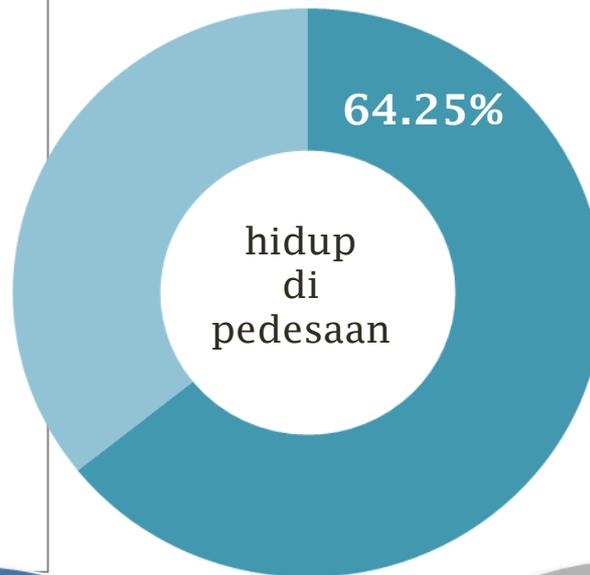
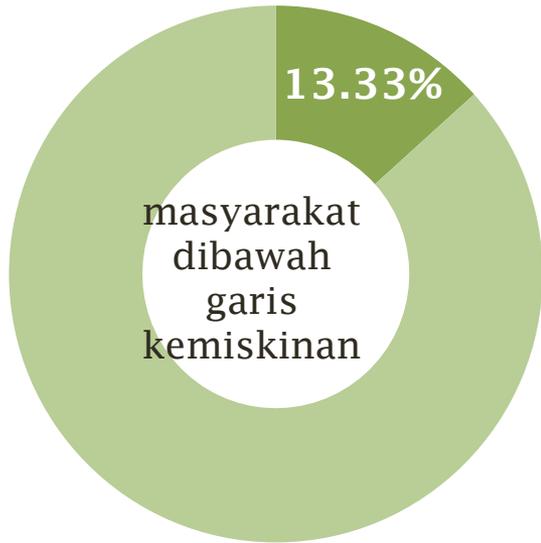
Penabung



Peminjam

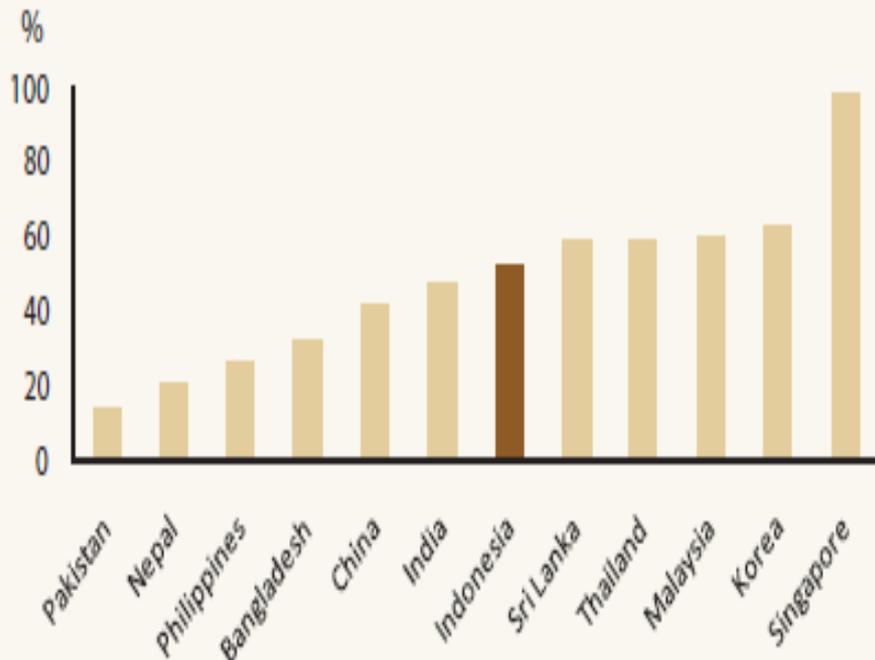


Kondisi Akses ke Perbankan Saat Ini

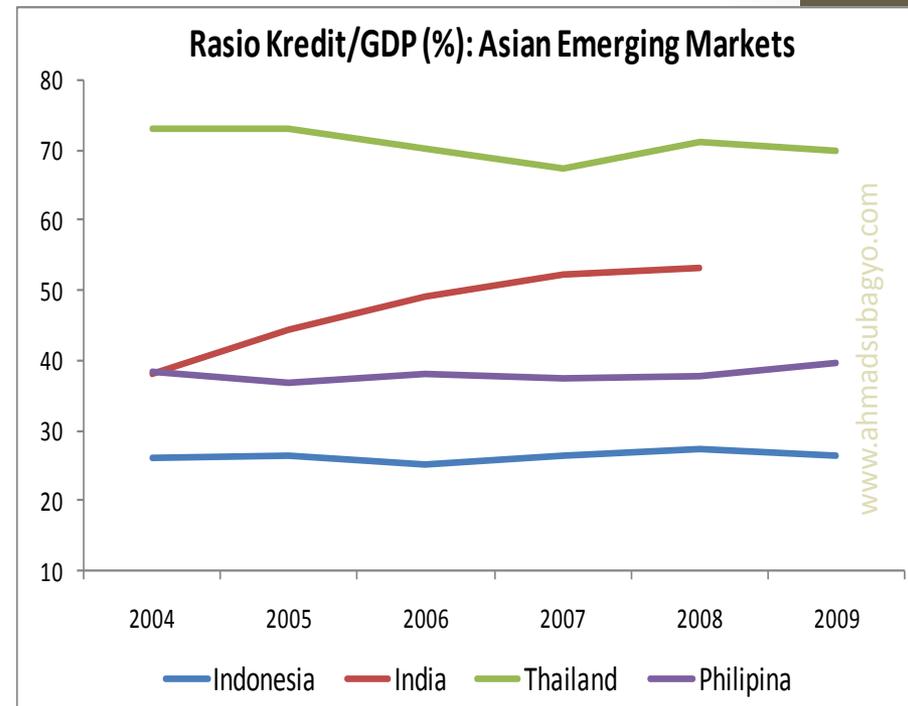


Perbandingan Kondisi Akses Keuangan

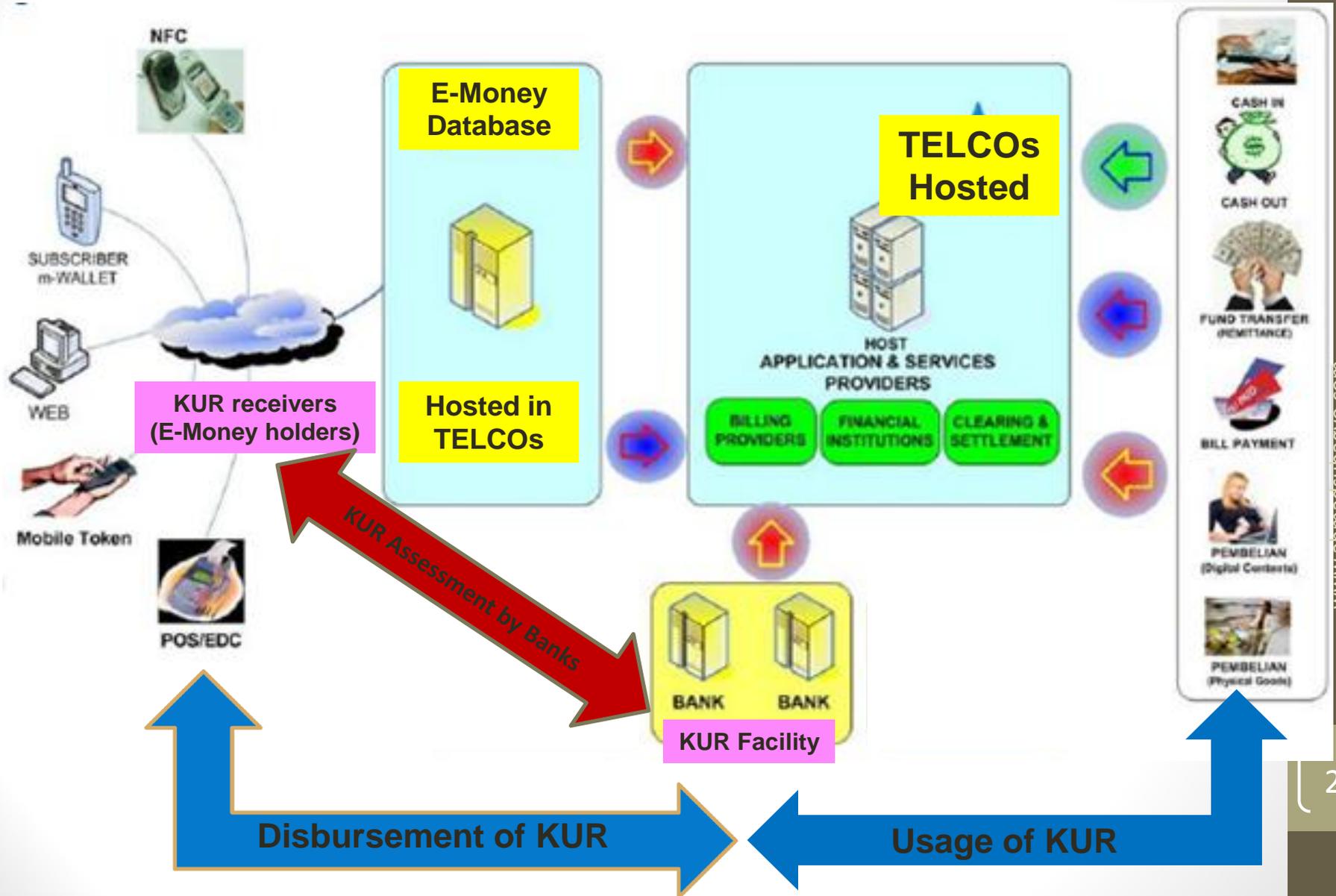
Perbandingan Akses Masyarakat terhadap Jasa Keuangan



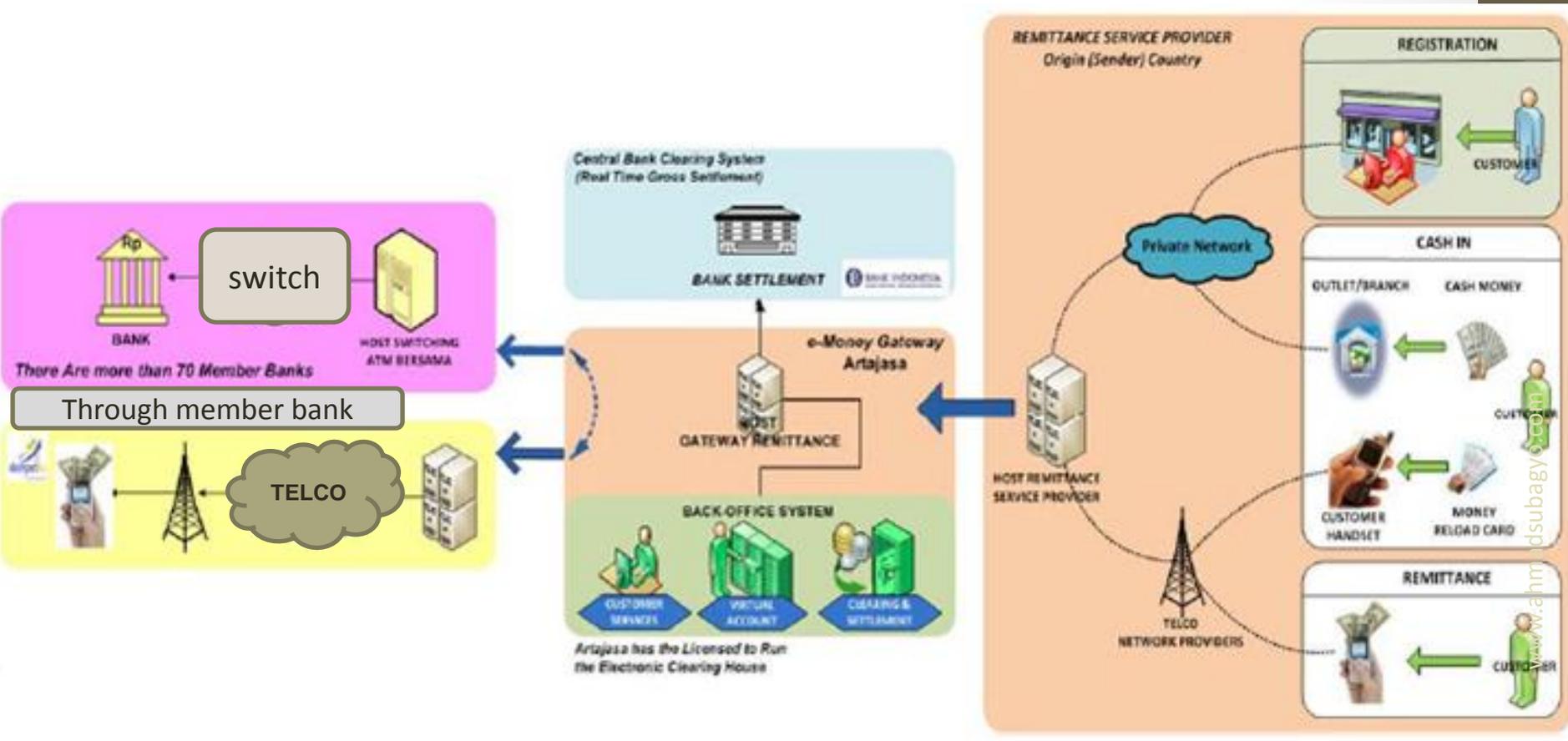
Perbandingan Rasio Kredit / GDP di Asian Emerging Market



Peran Payment System sebagai Bagian dari Keuangan Inklusif dalam Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)



Peran Payment System sebagai Bagian dari Keuangan Inklusif dalam Pelaksanaan KUPU (Remittance)





Peranan Mobile Payment System dalam Kegiatan Keuangan Inklusif

Tanpa Mobile Payments

- uang tunai yg dibawa pengumpul terbatas, ini menjadi alasan menekan harga jual produk petani
- uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari, membeli pupuk/bahan baku dan membayar biaya pengangkutan terbatas sehingga mengganggu kelancaran usaha.

Biaya pengangkutan



Pedagang Pengumpul



Pupuk



Petani di remote area



Mobile Payment System

Dengan Mobile Payments

- petani/produsen dapat mencari informasi harga yg optimal untuk produknya.
- Pedagang/pengumpul dapat melakukan transfer dana menggunakan hp ke petani/produsen (menggunakan e-money).
- uang (e-money) dapat digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, membeli pupuk/bahan baku dan membayar biaya pengangkutan sehingga kegiatan usaha lebih lancar.

Pedagang Sembako



Manfaat Mobile Payment System :

- Meningkatkan efisiensi ekonomi
- Mengurangi biaya transaksi
- Meningkatkan likuiditas perekonomian
- Meningkatkan produktivitas perekonomian
- Memfasilitasi pertumbuhan ekonomi

BAB 5

PERKEMBANGAN BANK ASING

CLASS DISCUSSION

1. Dominasi Bank Asing

- Gambaran umum perkembangan Bank Asing saat Ini
- Pro & Kontra
- Saran terhadap Otoritas

2. Pendapat saudara mengenai perlu tidaknya pemegang saham pengendali (PSP) suatu bank

Perkembangan Bank Asing

Perkembangan Beberapa Indikator Perbankan Berdasarkan Kepemilikan

No.	Indikator (%)	KCBA			Kepemilikan Asing >50%			Bank Umum Nasional			Industri		
		2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
1	Pangsa Total Asset	8,74	10,11	8,07	40,93	43,24	40,57	58,57	56,76	59,43	100,00	100,00	100,00
2	Pangsa Kredit*	8,19	8,67	6,96	42,58	43,09	39,76	56,67	56,91	60,24	100,00	100,00	100,00
3	Pangsa DPK	7,38	7,32	5,96	40,18	41,09	39,32	59,43	58,91	60,68	100,00	100,00	100,00
4	Pangsa Pendapatan Operasional	13,15	13,41	10,56	44,76	47,14	44,97	54,80	52,86	55,03	100,00	100,00	100,00
5	Perumbuhan Total asset (yoy)	13,26	34,59	-12,48	18,26	22,88	2,91	16,74	12,72	14,83	17,30	16,32	9,68
6	Perumbuhan Kredit (yoy)*	14,34	38,21	-11,78	28,39	32,08	1,47	25,22	31,06	16,39	26,48	30,51	6,66
7	Perumbuhan DPK (yoy)	24,01	15,16	-8,40	19,76	18,68	7,68	15,99	15,04	15,92	17,39	16,06	12,33
8	Perumbuhan Pendapatan Operasional (yoy)	1,68	21,65	-10,38	4,38	25,67	8,54	2,74	15,08	18,46	3,38	19,31	12,88
9	NPL Gross*	5,35	5,83	7,40	2,72	2,74	3,29	5,13	3,55	3,32	4,07	3,20	5,11
10	CAR	24,69	27,29	35,22	21,64	19,40	21,69	17,54	13,32	14,40	19,30	16,04	17,77
11	ROA	3,88	3,89	3,54	3,02	2,71	2,62	2,63	2,05	2,61	2,78	2,34	2,11
12	LDR*	73,58	88,31	85,05	70,29	78,22	73,70	63,24	72,05	72,34	66,33	74,58	72,88
13	BOPO	77,30	81,00	75,62	77,44	82,64	81,80	79,79	85,33	81,95	78,83	84,10	81,57
14	Kredit Ekspor (Rp T)	8,72	21,07	6,20	20,96	42,18	21,79	21,06	32,14	26,43	43,75	74,32	48,23
15	LC (Rp T)	6,27	3,11	4,28	17,48	11,12	14,27	24,50	20,63	22,91	42,02	31,74	37,18

Ket: *) Tanpa Channeling

- Analisa berikut ini akan membahas kinerja dan kontribusi per kelompok bank berdasarkan kepemilikan yaitu Kantor Cabang Bank Asing (KCBA), kepemilikan asing >50% (KCBA, Bank Campuran dan Bank Umum Nasional) dan Bank Umum Nasional (kepemilikan asing <50% atau tanpa kepemilikan asing).

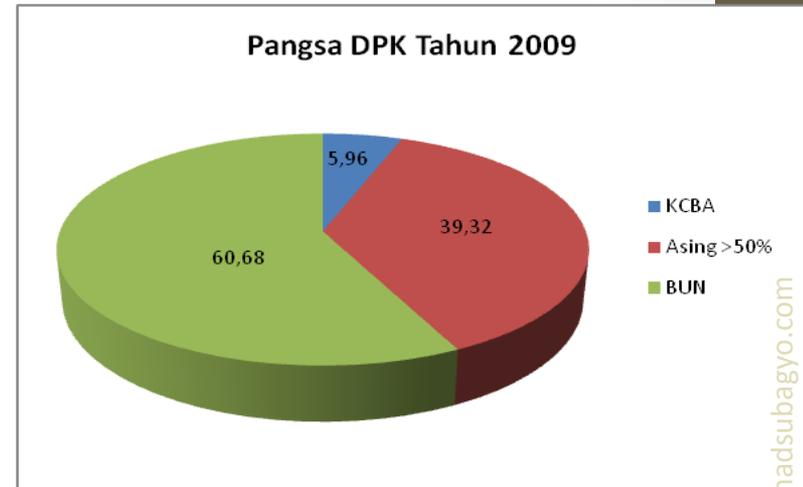
Perkembangan Bank Asing

1. Pangsa dan Pertumbuhan Total Aset



- Pada akhir 2009, pangsa total aset KCBA terhadap industri perbankan relatif kecil yakni 8,07%. Sementara, pangsa bank dengan kepemilikan asing>50% (termasuk KCBA) sebesar 40,57% atau dibawah Bank Umum Nasional (BUN) sebesar 59,43%.
- Total aset KCBA pada 2009 tumbuh negatif 12,48%. Sementara, bank dengan kepemilikan asing>50% (termasuk KCBA) hanya tumbuh 2,91%. Pada sisi lain, total aset BUN tumbuh cukup tinggi yakni 14,83% atau lebih tinggi dari pertumbuhan total aset industri (9,68%).

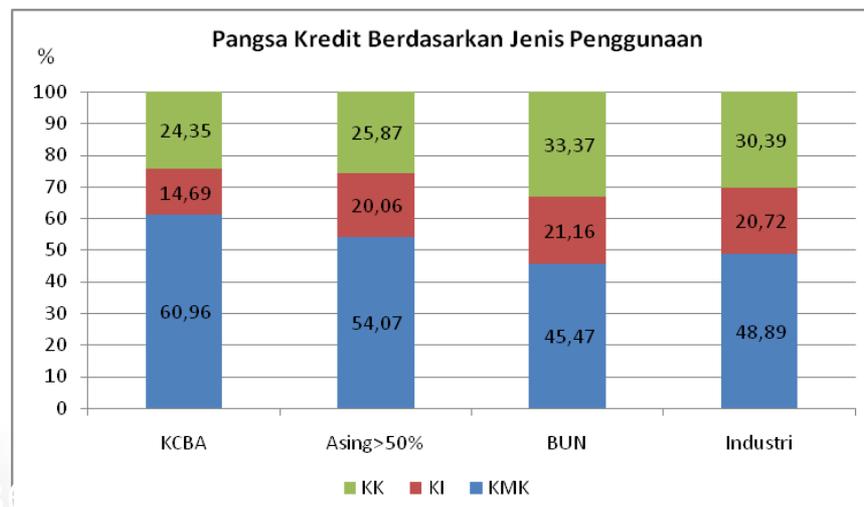
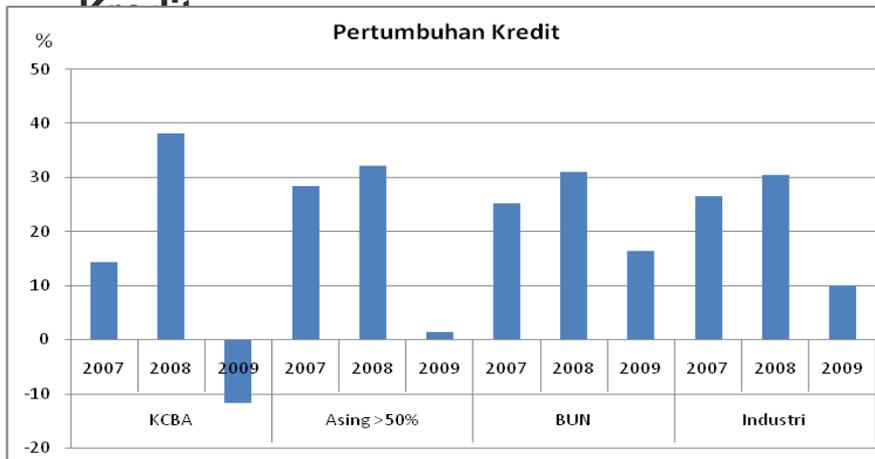
2. Pangsa dan Pertumbuhan DPK



- Pangsa DPK KCBA terhadap industri pada akhir 2009 relatif kecil (5,96%). Namun, pangsa DPK seluruh bank dengan kepemilikan asing>50% (termasuk KCBA) tercatat cukup tinggi (39,32%). Secara keseluruhan, pangsa DPK BUN masih cukup dominan (60,68%).
- Sejak 2007, pertumbuhan DPK kelompok KCBA menurun dan bahkan tahun 2009 tumbuh negatif 8,40%. Namun, pertumbuhan DPK kelompok bank dengan kepemilikan asing>50% (termasuk KCBA) sedikit lebih baik, yaitu 7,68%. Sementara, pada kelompok BUN relatif stabil yakni 15,65%.

Perkembangan Bank Asing

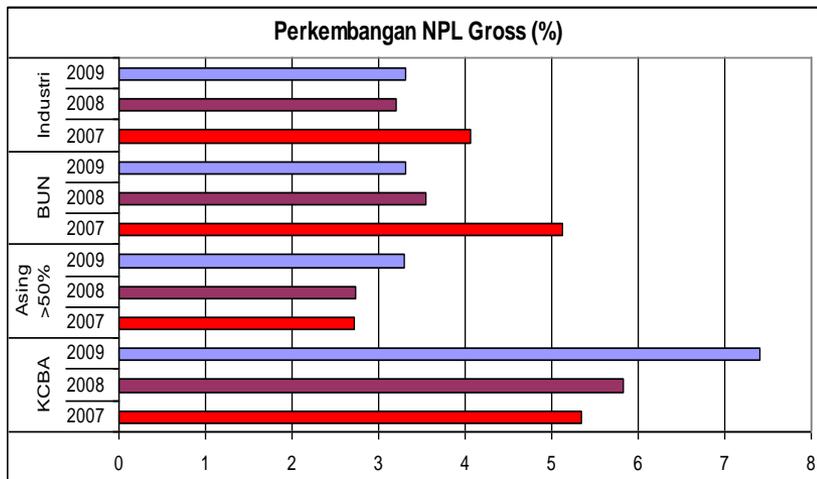
3. Pangsa dan Growth



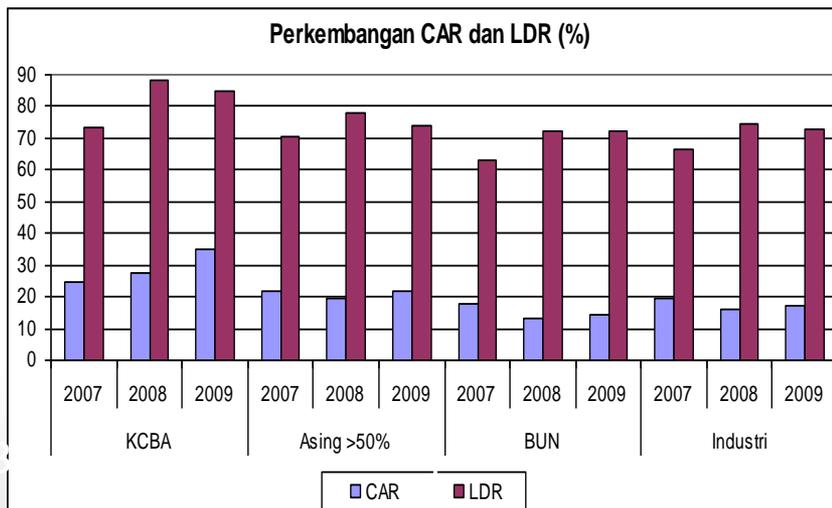
- Pada 2009, semua kelompok bank mengalami penurunan pertumbuhan kredit, bahkan kelompok KCBA tumbuh negatif 11,78%. Sementara, bank dengan kepemilikan asing > 50% (termasuk KCBA) hanya tumbuh 1,47%. Namun, kredit kelompok BUN tumbuh cukup tinggi (16,39%) atau di atas industri (10,0%).
- Sejalan dengan itu, pangsa kredit kelompok KCBA dan kelompok bank dengan kepemilikan asing > 50% terhadap total kredit perbankan menurun. Sementara, pangsa kredit kelompok BUN naik menjadi 60,24%.
- Pertumbuhan kredit yang rendah pada kelompok bank dengan kepemilikan asing > 50% (termasuk KCBA) sejalan dengan pertumbuhan DPK yang juga rendah.
- Pada 2009, menurut jenis penggunaan, pangsa KMK kelompok bank yang dimiliki oleh asing > 50% (termasuk KCBA) tercatat sebesar 54,07% atau lebih tinggi dibandingkan kelompok BUN (45,47%). Sebaliknya, untuk KI dan KK, pangsa kelompok BUN adalah yang tertinggi masing-masing 21,16% dan 33,37%.
- Hal ini menunjukkan bahwa kelompok bank yang dimiliki oleh asing > 50% (termasuk KCBA) lebih banyak menyalurkan dananya untuk kredit produktif.

Perkembangan Bank Asing

4. NPL Gross



5. CAR dan LDR



- Pada tahun 2007-2009, NPL gross kelompok KCBA yang tertinggi dibandingkan kelompok bank lainnya dan juga industri. Pada tahun 2009, NPL gross kelompok KCBA sebesar 7,40% sedangkan industri 3,31%. Sementara itu, NPL gross kelompok bank dengan kepemilikan asing>50% merupakan yang terendah (3,29%). Perkembangan ini menunjukkan bahwa walaupun pangsa kredit kelompok KCBA yang terendah namun NPL-nya tertinggi, sehingga hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kredit kelompok KCBA tumbuh negatif pada tahun 2009.

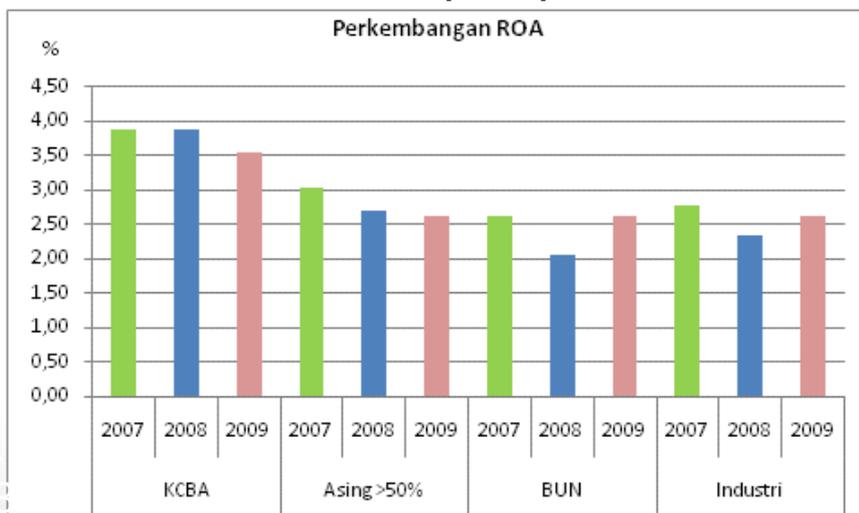
- Permodalan (CAR) kelompok KCBA pada tahun 2007-2009 adalah yang tertinggi diikuti kelompok bank dengan kepemilikan asing>50%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa salah satu kekuatan bank yang secara dominan dimiliki oleh asing adalah kemudahan akses kepada sumber modal yang kuat jika dibandingkan dengan kelompok BUN. CAR yang tinggi tersebut diharapkan dapat mendorong kelompok bank dengan kepemilikan asing>50% (termasuk KCBA) untuk lebih meningkatkan penyaluran kreditnya.
- Selama 3 tahun terakhir, fungsi intermediasi kelompok KCBA dan kelompok bank dengan kepemilikan asing>50% lebih baik yang tercermin dari LDR kedua kelompok bank tersebut lebih tinggi dari kelompok BUN bahkan industri. Pada tahun 2009, LDR kelompok KCBA sebesar 85,05% atau diatas industri (73,00%).

Perkembangan Bank Asing

6. Pangsa dan Growth Pendapatan Operasional



7. Return on Assets (ROA)



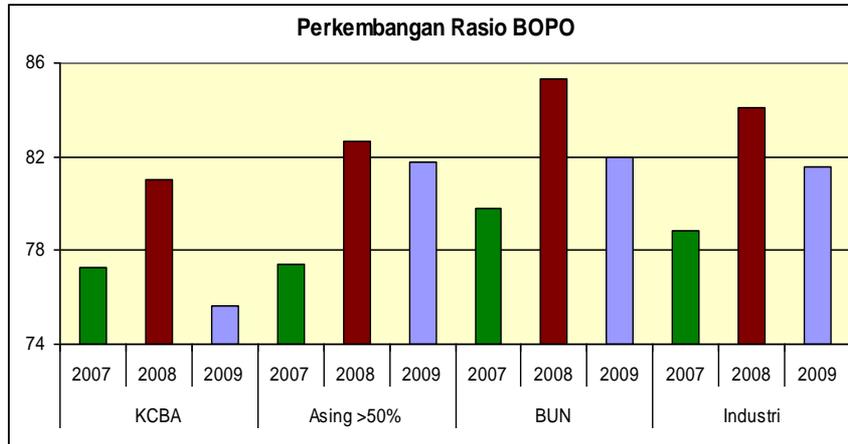
Seiring dengan pertumbuhan kredit KCBA yang negatif pada 2009, pertumbuhan pendapatan operasional juga menurun menjadi negatif 10,38%. Sementara, untuk kelompok bank dengan kepemilikan asing >50% (termasuk KCBA) mengalami pertumbuhan sebesar 8,54%. Sejalan dengan cukup tingginya pertumbuhan kredit kelompok BUN, pendapatan operasionalnya juga tumbuh cukup tinggi (18,46%) atau melampaui pertumbuhan pendapatan operasional industri sebesar 13,78%.

- Akibatnya, pangsa pendapatan operasional kelompok BUN terhadap total pendapatan operasional perbankan meningkat menjadi 55,03%, sedangkan pangsa kelompok bank dgn kepemilikan asing >50% mengalami penurunan menjadi 44,97%.

- Perkembangan ROA semua kelompok bank mengikuti kondisi yang terjadi pada pendapatan operasional. ROA kelompok BUN meningkat dari 2,05% (2008) menjadi 2,61% (2009), sedangkan ROA kelompok bank dgn kepemilikan asing >50% menurun dari 2,71% menjadi 2,62%.
- Namun, selama 2007-2009, ROA kelompok KCBA merupakan yang paling tinggi, dibandingkan kelompok bank lainnya yaitu pada kisaran 3,54% -3,89%.

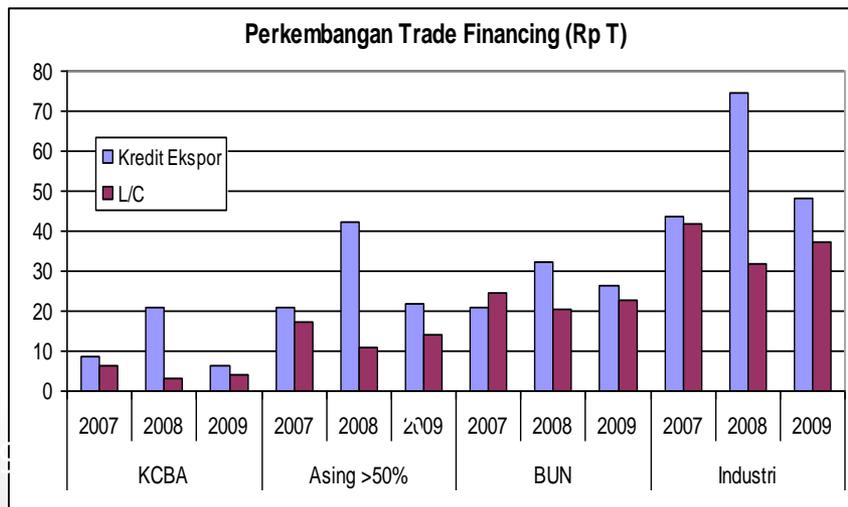
Perkembangan Bank Asing

8. Rasio BOPO



- ROA yang lebih tinggi pada kelompok KCBA disebabkan tingkat efisiensi kelompok bank tersebut yang lebih baik. Hal ini tercermin dari rasio BOPO, dimana pada tahun 2009 rasio BOPO kelompok KCBA sebesar 75,62%, sedangkan industri 81,57%. Sementara itu, rasio BOPO kelompok bank dengan kepemilikan asing >50% sebesar 81,80% atau sedikit lebih rendah dari kelompok BUN (81,95%)

9. Trade Financing



- Jika dilihat aktivitas *trade financing* per kelompok bank maka kelompok BUN lebih dominan dibandingkan kelompok bank lainnya selama 3 tahun terakhir. Hanya pada tahun 2008 kredit ekspor kelompok BUN lebih rendah dari kelompok bank dengan kepemilikan asing >50%. Dengan demikian terlihat bahwa kelompok BUN mempunyai komitmen yang lebih besar dalam mendorong aktivitas ekspor dan impor walaupun kelompok bank dengan kepemilikan asing >50% (termasuk KCBA) mempunyai kemampuan yang lebih baik dan jaringan yang lebih luas di luar negeri.

Discussion

Terima Kasih